Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah

MENARA Ilmu**DAFTAR ISI**

Aplikasi Data Mining untuk Perbandingan Manajemen Laba Terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan Perbankan yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia oleh Andika Prajana	1
Penguasaan Bahasa dan Profesionalisme oleh Abdul Aziz Rambe	13
Uji Aktivitas Antibakteri Dan Fitokimia Tanaman Obat Luka (<i>Cestrum elegans</i>) (Solanaceae) Terhadap Bakteri <i>Streptococcus mutans</i> oleh Busman	19
The Appreciation Of Poetry and Models Constitutes With Advertismnet Technology oleh Ahmad Kusnin	27
Beberapa Pertimbangan dalam Perencanaan Produksi oleh Yurina	36
Macam-macam Distribusi dan Analisis Penjualan oleh Jafar Abdurrahman	42
Karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi mata pelajaran biologi oleh Mohd. Gade	50
The Appreciation of Poetry and Mosels Constitutes oleh Muhammad Reza	59
Sistem Pondasi Jalan Pedesaan Tanpa Penutup oleh Novi Bachtiar	68
Hubungan Frekuensi Penyikatan Gigi dengan Periodontitis pada Pasien yang Berobat ke RSGMP Baiturrahman oleh Nurhamidah Darwin	76
Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Poligami oleh Nofil Gusfira	80
Pengaruh Kinerja Pelayanan RS. Islam Ibnu Sina dan Kepuasan Pasien sebagai Variabel Moderator Terhadap Loyalitas Pasien pada RS Islam Ibnu Sina di Sumatera Barat oleh Gus Andri	85
Pengembangan Struktur Beton Tahan Gempa pada Bangunan Non Teknis oleh Ridwan	94
Hak-hak Penguasaan Pohon di Agroforestri (Parak): Kepentingan Komunal atas Private di Sumatera Barat oleh Tri Martial	101
Pendekatan Sistem dalam Perencanaan dan Manajemen Pendidikan oleh Abdul Azis Rambe	108
Disain dan Implementasi Databse Security di Dunia Perbankan Menggunakan Teknik Kriptografi Playfair Cipher oleh Resmi Darni dan Vitriani	115

HAK-HAK PENGUASAAN POHON DI AGROFORESTRI (PARAK) : KEPENTINGAN KOMUNAL ATAS PRIVATE DI SUMATERA BARAT

Oleh.

Tri Martial

Agribisnis, Faperta, Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. Karya Bhakti No. 34 Medan 20143, Indonesia, Tel. 061-7777-5085
E-mail: tri_martial@yahoo.com

Abstract

Deforestation in Indonesia is recognized very high, even reaching 1.4 million ha per year. But the rehabilitation of the damaged areas is less likely to receive appropriate care. Trees planting are often pointed out as mere sporadic activity. Agroforestry much promoted as a sustainable form of land use, but generally in traditional form. In West Sumatra, agroforestry (parak) at communal land survive in the long run but in the form of traditional management. The research objective is to understand why agroforestry in general do not evolve, and the opposite people prefer to cut down than planted trees. It is point out from the relationship between land and tree tenure as the rules of local customary institutions. For that's purpose survey conducted in three villages in West Sumatra has a distinctive character of agroforestry.

The results showed essentially communal land has been more privatized indicated by strong private rights on agricultural crops. Tree tenure status did not follow the status of land rights. Rights over trees varied depending on the type of trees and the importance of trees (commercial or community purposes). Security of tree rights did not follow the security of rights to land. Security of tree rights is determined by rules based to the communal institutions of local custom. Communal rights actually strengthen the sustainability of agroforestry systems. Local rules do not provide the opportunity for individual to change the agroforestry systems to the agriculture farm.

Key words: Agroforestry, communal land, land and tree tenure, local institution rules, West Sumatra

I. PENDAHULUAN

Selama ini kebijakan pengelolaan hutan oleh pemerintah Indonesia menjadikan hutan sebagai sumber devisa dan lebih mementingkan perusahaan-perusahaan besar pemerintah atau swasta, sedang pengelolaan tradisional oleh masyarakat dipinggirkan. Pengelolaan hutan masyarakat dalam bentuk-bentuk agroforestri justru sering sebagai pola pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, namun umumnya dalam bentuk yang masih tradisional, tidak berkembang. Hal ini menjadi permasalahan agroforestri di tingkat masyarakat (Djogo *et al*, 2003).

Di Sumatera Barat agroforestri telah dikenal secara luas sejak lampau dalam bentuk 'parak' (lahan berhutan). Agroforestri umumnya ditemui pada lahan-lahan masyarakat khususnya pada lahan kering dalam bentuk ladang atau kebun. Sebagian besar lahan berhutan (parak) merupakan lahan ulayat dan tidak bersertifikat. Lahan umumnya merupakan kepemilikan komunal kaum/suku, dimana pemegang lahan mendapatkan hak untuk mengelola lahan (ganggam bauntuak) sebagai warisan yang berasal dari garis ibu (matrilineal). Sebagai kepemilikan komunal lahan tidak dapat

dijual tetapi dapat dipergunakan/ diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari oleh pemegang lahan.

Secara teoritis lahan komunal mempunyai keamanan penguasaan yang lemah (Otsuka *et al*, 2001). Hal ini berdampak terhadap investasi pohon dalam jangka panjang yang cenderung dihindari sebab tidak jelas siapa yang akan memanennya nanti. Namun di Sumatera Barat agroforestri pada lahan komunal telah mampu bertahan dalam periode panjang. Hal ini merupakan penataan yang secara khusus diatur dalam kelembagaan adat lokal. Tulisan ini berasal dari hasil observasi penelitian di lahan agroforestri pada tanah komunal di Sumatra Barat. Dimana terdapat praktek-praktek agroforestri tradisional yang tetap eksis sampai sekarang. Agroforestri potensial untuk dikembangkan sebab dinilai sebagai sistem *land use* yang tepat untuk mengatasi masalah kerusakan hutan dengan melakukan penanaman pohon pada lahan pertanian, serta mampu meningkatkan pendapatan petani dan akhirnya mengurangi intensitas tekanan pada hutan. Pengembangannya sendiri dapat berkontribusi positif dalam mereduksi dampak negatif perubahan iklim global.

II. VARIASI HAK-HAK PENGUASAAN POHON

Pola hak-hak pada pohon dapat berbeda tergantung kepada jenis pohonnya, oleh sebab itu penggambaran pola hak-hak ini ditunjukkan dalam matrik penguasaan pohon berdasarkan jenis pohon (Tabel 1). Di nagari Paru hak-hak penguasaan perorangan pada karet menunjukkan hak-hak pemilikan dan pemanfaatan yang kuat pada penanam, dimana ia dapat menjual getah karet sebagai sumber pendapatan. Pada kulit manis (*Cinnamomum burmani*) penanam berhak atas kulit batang dan menjual sebagai sumber pendapatan, walaupun anggota kaum dapat mengambil ranting dan dahan serta batang yang telah ditebang untuk kebutuhan sendiri. Pola yang berbeda hak-hak pada pohon durian (*Durio zibethinus*), dimana batang pohon dimiliki oleh pemegang hak tanah tetapi buah menjadi milik bagi seluruh anggota nagari. Buah hanya dipanen ketika jatuh ke tanah. Begitu pula hak atas batang untuk menebang harus mendapat izin seluruh *ninik-mamak* (32 orang) nagari Paru.

Tabel 1. Matrik penguasaan pohon pada tanah ulayat kaum/suku di tiga nagari

Nagari	Jenis Pohon	Jenis Hak-hak
Paru	Karet (<i>Havea brasiliensis</i>)	Getah dimiliki oleh penanam, batang dan ranting dapat juga anggota kaum, dapat dijual bahkan dalam bentuk kebun, penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas
	Kulit manis (<i>Cinnamomum burmani</i>)	Kulit dimiliki oleh penanam untuk tujuan pendapatan, batang dan ranting juga dapat dimiliki anggota kaum, penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas
	Durian (<i>Durio zibethinus</i>)	Buah dimiliki oleh anggota nagari, sedangkan batang oleh pemilik tanah dan anggota kaum. Menebang

Koto Malintang		memerlukan izin seluruh ninik mamak Paru. Penguasaan hak-hak tersebut dalam waktu yang tidak terbatas
	Banio (<i>Shorea</i> sp) dan meranti (<i>Shorea</i> sp),	Batang dasarnya dimiliki oleh penanam tapi anggota kaum dan nagari dapat memanfaatkan dengan izin pemilik tanah. Izin tebang dari mamak suku
	Durian (<i>Durio zibethinus</i>)	Buah dimiliki oleh pemilik tanah dan anggota nagari dalam system balangge, sedangkan batang dimiliki oleh pemilik tanah dan anggota kaum. Izin tebang dari mamak tungganai dan wali nagari. Penguasaan tidak terbatas selama umur tanaman
	Kulit manis (<i>Cinnamomum burmanii</i>)	Penanam dan anggota kaum berhak atas kulit dan batang, sebagai sumber pendapatan. Lama penguasaan seumur tanaman
	Surian (<i>Toona sureni</i>), meranti (<i>Shorea</i> sp) dan bayur (<i>Pterospermum javanicum</i>)	Hak atas batang pada pemegang tanah dan anggota kaum, begitu pula dengan ranting dan dahan. Tebangan perlu izin dari mamak dan wali nagari. Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.
Panninggahan	Cengkeh (<i>Eugenia aromatica</i>), durian (<i>Durio zibethinus</i>), alpukat (<i>Persea americana</i>) dan kakao (<i>Theobroma cacao</i>)	Hak atas buah dan menjual buah dimiliki penanam, tujuan untuk sumber pendapatan, tapi batang dahan dan ranting dapat dimiliki juga oleh anggota kaum. Penguasaan tidak ada batas waktu, selama tanah dikelola
	Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Surian (<i>Toona sureni</i>), jati (<i>Tectona grandis</i>) dan pinus (<i>Pinus</i> sp)	Hak atas batang pada pemegang tanah, tapi pada pohon warisan anggota kaum juga berhak. Hak menjual pada penanam, ranting dan dahan dapat dimiliki anggota kaum. Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.

Di nagari Koto Malintang hak-hak penguasaan pohon di tanah ulayat suku/kaum bervariasi berdasarkan jenis pohon. Pada pohon durian (*Durio zibethinus*) batang durian pada dasarnya pada pemegang hak tanah, tetapi hak atas buah mempunyai dimensi yang lebih luas dimana anggota nagari dapat mengambil buah yang jatuh pada waktu setelah terbit fajar (subuh) sampai dengan terbit matahari (sekitar dua jam) dalam sistem yang disebut *balangge*, selebihnya buah dimiliki oleh

pemegang hak atas tanah dan anggota kaum. Begitu juga dengan hak atas batang untuk menebang memerlukan izin *mamak* tungganai dan wali nagari. Jika durian di tebang di tanah ulayat kaum seperempat bagian adalah milik pemegang hak tanah, seperempat lagi dibagi dengan ahli waris yang lain, dan separoh sisanya untuk penebang pohon.

Di nagari Paninggahan penguasaan pohon (*tree tenure*) pada tanah ulayat kaum/suku pada dasarnya dapat dibedakan pada jenis pohon penghasil buah (non-kayu), dan pohon untuk penghasil kayu. Hak atas buah (bunga cengkeh) dan menjual buah dapat dilakukan oleh pemegang hak atas tanah, serta dalam waktu yang tidak terbatas sepanjang tanah berada dalam penguasaannya. Sedangkan untuk pohon penghasil kayu hak atas batang ada pada pemegang hak tanah tetapi anggota kaum dapat meminta kayu untuk kepentingannya, khususnya pada kayu warisan yang ditanam oleh orang tua sebelumnya.

Hak-hak penguasaan pohon di tanah ulayat kaum/suku juga mengarahkan terdapat dualisme hak-hak, yaitu hak perorangan dan hak komunal. Hak perorangan pada pemegang tanah/pemilik pada pohon adalah dapat ditanam dan tanam lagi, dipelihara, dilindungi, diwariskan, diberikan kepada orang lain, menebang pohon (pada pohon yang sudah ada saja), dan menjual pohon (seperti banio (*Shorea* sp), meranti (*Shorea* sp). Sedangkan hak-hak komunal adalah bertujuan untuk kepentingan komunal, seperti menjaga kelestarian sumber daya.

III. HAK-HAK PERORANGAN DAN KOMUNAL PADA POHON

Hak-hak perorangan yang ada pada pohon (penghasil kayu) di tanah ulayat kaum/suku ini menunjukkan jumlah hak-hak yang bervariasi antar nagari adalah. Hak-hak perorangan yang ada pada pohon menunjukkan bahwa hak-hak tersebut walaupun pada dasarnya di bawah penguasaan pemegang tanah, namun terdapat hak-hak komunal yang membatasi kebebasan perorangan menggunakan pohon. Karakteristik hak-hak pada pohon di ketiga nagari tersebut dapat ditampilkan pada Tabel 2. Sedangkan keberadaan hak-hak yang berbeda dalam nagari secara langsung berdampak dalam sistem pemanfaatan lahan agroforestri.

Tabel 2. Jenis hak-hak pohon yang eksis di tiga nagari

No.	Jenis Hak	Nagari		
		Paru	Koto Malintang	Paninggahan
1.	Tanam dan tanam lagi	√	√	√
2.	Pemeliharaan	√	√	√
3.	Menebang	√	Γ	Γ
4.	Menggunakan pohon	√	Γ	√
5.	Mewariskan	√	√	√
6.	Menjual	Γ	Γ	Γ
Rata-rata hak pada pohon yang eksis		5,8	3,45	4,7

Keterangan: √ = dapat dilakukan dengan pemberitahuan

Γ = dapat dilakukan dengan musyawarah/ kondisi tertentu

Berdasarkan kepada hak-hak yang eksis ini dan dari indeks keamanan penguasaan pohon menunjukkan bahwa terdapat status keamanan penguasaan yang sedang sampai tinggi. Pada standar 6 hak-hak yang diobservasi di atas maka tingkat rata-rata keamanan hak-hak pada pohon tersebut mencapai 3,45-5,8. Perbedaan rata-

rata hak ini pada ketiga nagari membuktikan bahwa aturan yang berlaku pada suatu nagari terhadap klaim hak-hak pada pohon berbeda. Umumnya hak penguasaan pohon yang sering menjadi hambatan tersebut adalah menebang, menggunakan pohon dan menjual. Menjual hasil tebangan ini menjadi pembatas di sebagian besar petani responden.

Dari sini nampak di lahan ulayat kaum/suku, tanaman pertanian merupakan kepemilikan penanam, tetapi pada jenis-jenis pohon yang bukan tanamannya sendiri terdapat hak komunalnya di situ. Hal ini berdampak pada kondisi demikian sulit mengubah jenis-jenis tanaman. Tanaman yang terdapat hak komunal padanya, maka pemegang lahan tidak dapat menggantikannya dengan jenis tanaman baru. Jadi disini hak individual pemegang lahan dan hak komunal tidak dapat dipisahkan. Bahkan anggota komunal masih dapat meminta kayu di lahan untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, namun untuk tujuan komersial hal ini dilarang.

Hak-hak komunal dan perorangan dapat terjadi secara bersamaan (Tabel 3). Pada hak-hak menggunakan pohon, menebang dan mewariskan, komunal suku/kaum berperan dalam pelaksanaannya. Dalam menggunakan pohon untuk kepentingan komunal juga dapat dilakukan pada pohon di tanah ulayat suku/kaum.

Tabel 3. Hak-hak perorangan dan komunal pada pohon yang ada di tanah ulayat kaum/suku

No.	Jenis Hak	Nagari		
		Paru	Koto Malintang	Paninggahan
1.	Tanam dan tanam lagi	Perorangan	Perorangan	Perorangan
2.	Pemeliharaan	Perorangan	Perorangan	Perorangan
3.	Menebang	Perorangan /komunal	Perorangan /komunal	Perorangan /komunal
4.	Menggunakan pohon	Perorangan /komunal	Perorangan /komunal	Perorangan /komunal
5.	Mewariskan	Perorangan /komunal	Perorangan /komunal	Perorangan /komunal
6.	Menjual	Perorangan	Perorangan	Perorangan

Sedangkan hak menebang juga menunjukkan perbedaan antar jenis tanaman/pohon. Hak menebang ini selain berdasarkan kepada pemilik pohon, jenis pohon, juga tergantung tujuan penebangan. Jika penebangan pohon dilakukan untuk tujuan kepentingan sendiri maka tebangan dapat secara bebas dilakukan tanpa perlu mendapat ijin *mamak*, tetapi jika tujuannya adalah untuk dijual maka perlu ijin *mamak* yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan kontrol tebangan masih dilakukan secara adat. Jika durian ditebang maka harus ada ijin seluruh *ninik mamak* di nagari paru (sebanyak 32 *ninik mamak*).

Aturan yang membedakan antar nagari tersebut bersumber dari sistem adat lokal yang merupakan bagian dari sistem *tenure* yang merupakan jaminan terhadap hak-hak komunal. Dalam hal tujuan mendapatkan keuntungan dari sistem *tenure*, di nagari Paru ditunjukkan oleh dominasi pohon karet (*Havea brasiliensis*) bertujuan sebagai sumber penghasilan dan motivasi bagi anggota nagari dalam menanam pohon. Sedangkan di Koto Malintang tujuan sebagai sumber penghasilan adalah pada pohon durian (*Durio zibethinus*) dan kulit manis (*Cinnamomum burmani*). Sedang di

Paninggahan adalah pada berbagai tanaman komersial seperti cengkeh (*Eugenia aromatica*), kakao (*Theobroma cacao*), dan alpukat (*Persea americana*). Pilihan-pilihan ini disesuaikan dengan realitas pembatas lingkungan yang bersangkutan.

Konsekuensi aturan adat ini tetap dipertahankan terus-menerus (Kato, 1978) dan tetap bertahan seperti pepatah yang mengatakan:

Adat lamo, pusako usang,

Indak lapuak dek ujan

Indak lelang dek paneh

Jadi hak-hak komunal pada pohon-pohon tertentu menunjukkan walaupun hak-hak lahan pada dasarnya dipegang oleh perorangan tetapi jaminan bagi kepentingan komunal pada pohon juga dapat dilakukan. Hal ini menurut Grigsby (2002) bahwa sistem *tenure* merupakan fenomena dinamis terutama untuk tujuan ekonomi berdasarkan kepada realitas pembatas lingkungan setempat. Pengelolaan sumber daya tradisional bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan bukan sekedar tujuan konservasi saja (Ruttan, 1998). Komunitas yang menggunakan sumber daya untuk kelestariannya harus mampu melakukan keduanya, mampu mencegah pengguna bebas dan mampu mengimplementasikan strategi pengelolaan yang tepat. Jadi pada dasarnya komunitas adat mempunyai alasan yang kuat dalam menentukan sistem *tenure* tradisional mereka dalam menjaga kelangsungannya. Jika hanya dilakukan pada tujuan ekonomi semata sementara konservasi diabaikan, akan mengubah keseimbangan yang ada. Jadi aturan hak-hak perorangan dan hak-hak komunal pada berbagai jenis pohon yang berbeda adalah upaya dalam menjaga keseimbangan tersebut.

IV. KESIMPULAN

1. Penguasaan lahan menunjukkan lebih terprivatisasi diindikasikan oleh kuatnya hak-hak perorangan terhadap produk tanaman pertanian.
2. Hak atas pohon bervariasi tergantung jenis dan fungsi pohon dalam komunitas.
3. Jaminan penguasaan pohon ditentukan oleh aturan berdasarkan institusi komunal (adat). Hak-hak komunal secara actual mendorong keberlanjutan sistem agroforestri setempat (parak).
4. Aturan lokal tidak mendukung pemegang tanah mengubah agroforestri (parak) menjadi pertanian monokultur.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckmann, F. and K. Benda-Beckmann. 2001. Jaminan Sosial, Sumber daya Alam dan Kompleksitas Hukum. Dalam Benda-Beckman, F., K. Von Benda-Beckmann, and Julietta Koning (Ed). *Sumber daya Alam and Jaminan Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djogo, T., Sunaryo, D. Suharjito, dan M. Sirait. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri. *Bahan Ajaran Agroforestri* 8. ICRAF. www.worldagroforestrycentre.org
- Otsuka, K., S. Suyanto, T. Sonobe dan T.P. Tomich. 2001. Evolution of land tenure institutions and development of Agroforestry: Evidence from customary lands areas of Sumatera. *Agricultural Economics* 25 (2001): 85-101
- FAO, 2002. Land tenure and rural development. *FAO Land tenure studies*. FAO 2002.
- FAO, 1989. Community Forestry Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure. *FAO Corporate Document Repository*. www.fao.org

- Kato T. 1978. Change and Continuity in the Minangkabau Matrilineal System. *Indonesia*, Vol. 25 (Apr., 1978), pp. 1-16 Published by: Southeast Asia Program Publications at Cornell University Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3350964>
- Grigsby, W.J. 2002. Subsistence and land tenure in the Sahel. *Agriculture and human Values* 19: 151-164 2002
- Ruttan, L.M. 1998. Closing the Commons: Cooperation for Gain or Restraint?. *Human Ecology*, Vol. 26, No. 1, 1998